

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KABUPATEN KARAWANG DALAM PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

(Strategy of the Office of Womens' Empowerment and Child Protection of Karawang Regency in the Program of Participation and Gender Equality in Development)

Oleh :

Rizky Dwi Lestari, dan Dr. H. Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si

ABSTRACT

The results of this study indicated that the Strategy carried out by the Women's Empowerment and Child Protection Office of Karawang Regency, as a goal to accelerate the role of women and gender equality in various fields of development. At the Goal, the objective increased the role of women in politics. It improved gender equality in development planning documents. The implementation environment of the strategy and the threatening external environment came from the influence of the Patriarchal culture. Theunpreparedness of women in various fields of development and incomplete understanding of gender. Theopportunity got great support from the Karawang Regent. Theinternal environment was supported by good organizational capacity. Determining Direction carried out with each SKPD in Karawang who has a gender analysis workflow method namely (Gender Analysis Pathway) GAP and (Gender Budget Statment) GBS by targeting a minimum of 10 SKPD and maximizing the quota of 30% women to be legislated until the target of Karawang DPRD Chair is female. The action was carried out by providing socialization to the SKPD to include the work method of gender analysis in each development planning document and providing training needed by female legislative candidates. Learning was carried out by conducting direct socialization to the Head of the SKPD who has the power in the process of making planning documents and pressing political parties to increase the presence of female party cadres in each training made.

Keyword : Strategy, Development, DPPPA

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pendekatan pembangunan global dewasa ini mulai menitikberatkan pada peran gender dalam pembangunan, gender mulai dikaji dan dimasukkan sebagai strategi dalam pembangunan. Berangkat dari sudut pandang dasar bahwa semua keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari laki-laki dan perempuan tersebut bisa berakibat pada kesenjangan, ketidakadilan bahkan penindasan dari elemen satu terhadap elemen lainnya. Oleh karena itu,

semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran gender yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mansour Fakih (2006: 71) gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Artinya konsep gender adalah hasil dari konstruksi sosial maupun kultural disebuah kelompok masyarakat yang bisa berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga konsep gender jelas berbeda dengan konsep jenis kelamin/ sex.

Dalam konferensi Nairobi tahun 1985 dibicarakan kemungkinan memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan negara dan pembangunan serta diperkuat konferensi Beijing 1995 dengan lahirnya *platform action* strategi *gender mainstreaming*. Dalam konferensi tersebut dibicarakan upaya mengurangi praktek diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian melahirkan strategi ketiga yang dikenal dengan istilah *Strategi Gender Mainstreaming*. Strategi tersebut merupakan pematangan dari GAD yang tujuan dasarnya menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Sasaran utama kebijakan ini adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), institusi (organisasi dan masyarakat).

Indonesia telah menanggapi isu gender dalam pembangunan merupakan hal darurat yang harus segera diakomidir, sehingga di Indonesia sendiri strategi pembangunan ke tiga yakni *Gender and Development* diterjemahkan menjadi strategi Pengarusutamaan Gender yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunannasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Kabupaten Karawang merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat dari tahun ke tahun sebagai penyangga baru ibukota, dengan perubahan secara cepat arah perencanaan pembangunannya yang mengkolaborasikan sektor Pertanian sebagai jiwa Kabupaten Karawang tempo dulu dengan tuntutan pembangunan yang harus segera direspon yakni diadakannya sektor industri terbesar. Dengan proses pembangunan yang sedang dialami, Kabupaten Karawang menjadi sebuah daerah yang unik untuk diteliti sebab pembangunannya baru mulai berkembang menuju kabupaten besar yang didalamnya akan terjadi banyak proyek pembangunan fisik dan pembangunan manusia.

Jumlah penduduk Karawang yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang per tahun 2015 ialah berjumlah 2.273.579 jiwa, sedangkan untuk rasio jumlah laki-laki ialah 1.166.478 jiwa dan rasio jumlah perempuan 1.107.101 jiwa dengan jumlah rasio jenis kelamin ialah 105,36. Pembangunan manusia dengan jumlah penduduk sebanyak diatas dapat terlaksana dengan baik salah satunya dengan menggunakan strategi pembangunan yang berarusutama gender atau PUG. Sebab yang diperhatikan adalah bagaimana pengembangan masing-masing peran yakni peran laki-laki dan peran perempuan diseluruh aspek

pembangunan dapat diberdayakan dengan maksimal, sehingga masing-masing menjadi mandiri dan tidak hanya bergantung pada lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah SKPD yang fokus menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dalam urusan Perempuan dan Anak. DPPPA ini telah dibentuk memiliki lembaga khusus yang konsen terhadap *Gender Mainstreaming* yakni Bidang Pengarusutamaan Gender yang memiliki tupoksi sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Karawang nomor 46 tahun 2016. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 – 2021 menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai permasalahan, hasil rakor SKPD terkait monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, diantaranya :Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan. Masih kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan dilegislatif yang rendah. Sehingga bidang PUG membuat program kerja Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebagai cara untuk menanggapi isu-isu strategis diatas. Namun setelah dua tahun program Peran Serta dan Kesetaraan Gender berjalan justifikasi data yg ditemukan penulis menemukan kenyataan lain yang terjadi dilapangan, seperti hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Hesti Rahayu MM :

“Hingga sampai hari ini jumlah SKPD yang ada di Karawang berjumlah 21 SKPD dan yang baru menerapkan analisis gender GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan (*Gender Budget Statmens*) dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunannya baru berjumlah 3 SKPD itu pun belum semuanya hanya beberapa program yang sudah memiliki analisis gender di ke 3 SKPD tersebut, yakni 2 kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yakni Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Kota Layak Anak , 1 kegiatan di Dinas Kesehatan yakni Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ante Nasional dan terakhir 1 program di Dinas Pangan yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang sudah memiliki dokumen analisis gender tadi.

Ditambah peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam aspek politik di Kabupaten Karawang tahun 2014 - 2019 masih cukup rendah, hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan dilegislatif yakni dari 50 anggota dewan yang mewakili seluruh daerah pilihan di Kabupaten Karawang baru ada 10 dewan perempuan yang mampu lolos dan memiliki jabatan strategis sebagai aktor pembuat kebijakan dilegislatif. Lebih jauh dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Nama Anggota Dewan Perempuan di Kabupaten Karawang tahun 2014-2019

No.	Nama Anggota Dewan	Partai Politik
1.	Indriyani. ST	Partai Nasdem
2.	Neneng Siti Fatimah SE	PKB
3.	Rosmilah Amd	PDIP
4.	Ellevia Khrissiana ST	PDIP
5.	Nyi Sekar Arum SH	PDIP
6.	Sri Rahayu Agustina	Partai GOLKAR
7.	Saidah Anwar	Partai GOLKAR
8.	Suci Nurwinda	Partai Demokrat
9.	Dewi Rohayati S.Si	PAN

10.	Nurlelah Saripin SE	PBB
-----	---------------------	-----

Sumber : Laporan Sekretariat Dewan kepada DPPPA tentang data terpilah laki-laki dan perempuan di Parlemen Kabupaten Karawang.

Tabel di atas menjelaskan baru 5% perempuan Karawang menyumbang perannya dilegislatif. Padahal menurut Jamilahshay strategi PUG ini ialah strategi pembangunan yang harus masuk kedalam ranah kebijakan dan salah satu indikator ketercapaian kebijakan yang responsif gender adalah adanya perwakilan yang seimbang dari laki-laki dan perempuan dalam pembuatan kebijakan.

Berangkat dari fenomena diatas maka diperlukan Strategi yang lengkap dan sesuai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DPPPA) sebagai SKPD yang fokus membidangi implementasi PUG di daerah untuk meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang.

Sehingga rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang
2. Bagaimana Lingkungan Internal maupun Eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan
4. Bagaimana Aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang ?
5. Bagaimana Pembelajaran yang didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang ?

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender yakni Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang ditujukan untuk lembaga pemerintahan sampai ke tingkat Gubernur dan Bupati/Walikota, maka setiap lembaga yang ditunjuk harus segera meresponnya. Dalam hal ini Kabupaten Karawang sudah merespon intruksi tersebut dengan membuat OPD yang konsen terhadap kebutuhan terlaksannaya intruksi tersebut yakni DPPPA dengan dibentuknya bidang khusus yakni bidang Pengarusutamaan Gender pada tahun 2016.

Pelaksanaan arus utama gender dalam pembangunan atau Pengarusutamaan Gender ini pada akhirnya bermuara pada pembangunan yang berkeadilan gender. Artinya pembangunan memenuhi khitahnya sebagai alat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara multidimensional, karena memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sampai pada taraf terkecil

kelompok masyarakat yakni laki-laki dan perempuan. Kemudian pengarusutamaan gender ini bisa berhasil terlaksana apabila peran serta laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sudah setara, sebab dengan begitu mereka bisa menyuarkan setiap kebutuhan untuk mensejahterakan. Maka dari itu perlu adanya Strategi Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Karawang, Geoff Mulgan (2009) lebih lengkap menjelaskan bahwa proses kerangka kerja strategi terdiri dari lima tahapan, yaitu, mengetahui dan menentukan tujuan (*purposes*), menganalisa lingkungan (*environments*) internal maupun eksternal, menentukan arah (*direction*) capaian strategi, menentukan aksi/tindakan (*action*) yang hendak dilakukan, menganalisa pembelajaran (*learning*) yang didapat.

Pertama ialah mengetahui dan menentukan tujuan (*purposes*), dalam dimensi ini dijelaskan antara lain agar dapat memahami mengapa tujuan tersebut menjadisebuah yang penting dan bernilai, kemudian apa yang membuat tujuan tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan harapan seperti apa yang dimiliki dalam pelaksanaan tujuan tersebut.

Kedua ialah menganalisa lingkungan (*environments*) baik internal maupun eksternal organisasi, artinya dalam konteks tindakan perlu dianalisa ancaman dan kesempatan seperti apa yang mungkin akan ada dimasa mendatang, kemudian menganalisa sejauh mana kapasitas organisasi pelaksana startegi tersebut memiliki daya untuk meresponnya.

Ketiga ialah menentukan arah (*direction*) capaian strategi, antara lain menentukan prioritas strategi apa saja yang hendak dibuat dan target apa saja yang hendak dicapai dalam waktu tertentu yang sudah sama-sama disepakati

Keempat ialah menentukan aksi/tindakan (*action*) yang hendak dilakukan, ditahap ini berisi antara lain strategi apa yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan seperti apa yang sudah dikeluarkan selama mencapai tujuan tersebut dan implementasi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini.

Kelima ialah menganalisa pembelajaran (*learning*) yang didapat, antara lain berisi umpan balik dari strategi yang sudah dilakukan yang datang dari segi politik maupun publik dan bagaimana cara menyikapinya dan terakhir bagaimana evaluasi yang hendak dilakukan dalam implementasi strategi yang sudah dilakukan.

C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono Sugiyono (2016: 26) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2016:13) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai berikut : Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Dari metode penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang menggabungkan data hasil temuan lapangan dengan konsep yang menjadi *tools of analysis* penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Geoff Mulgan yang memiliki lima dimensi teori, yaitu, Tujuan, Lingkungan, Menentukan Arah, Aksi dan Pembelajaran sebagai *tools of analysis* dari program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan merupakan program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Bidang Pengarusutamaan Gender dan sudah berjalan sejak tahun 2016. Program tersebut memiliki beberapa kegiatan yakni :

1. Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender
2. Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
3. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Dalam hal ini KPPI berposisi sebagai mitra strategis bidang PUG untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan politik di Karawang. Kewenangan KPPI terhadap dinas hanya sebagai mitra strategis saja sehingga KPPI bisa dengan leluasa memilih program kerja apa saja yang akan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan KPPI wajib memberikan laporan kerja pertanggungjawabannya setiap tahun kepada DPPPA. Sehingga peneliti meneliti langsung pada organisasi KPPI untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1. Tujuan

Dalam wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber. Terkait tujuan program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, DPPPA khususnya bidang PUG telah memiliki tujuan yang jelas dan terarah yaitu meningkatkan Peran Perempuan dalam setiap aspek pembangunan yang ada, agar partisipasi perempuan bisa lebih besar dan setara dalam pembangunan dan sama-sama bisa menikmati hasil dari pembangunan yang ada. Dan mampu meningkatkan secara indikator keberhasilan yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan tersebut juga dilandasi atas kebutuhan yang ada hari ini bahwa ternyata perempuan masih minim partisipasinya dalam berbagai aspek pembangunan dan itu membuat perempuan tidak bisa menikmati hasil yang sama dari pembangunan sehingga perlu adanya percepatan strategi pengarusutamaan gender agar adanya keseimbangan atau kesetaraan gender didalamnya. Dan langkah tersebut dapatlah ditempuh selain memastikan setiap SKPD yang membuat rencana pembangunan sudah memiliki metode alur kerja analisis gender juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam

politik khususnya di legislatif sebagai salah satu pintu untuk mengeluarkan kebijakan terhadap pembangunan.

2. Lingkungan

Setelah peneliti pahami data yang didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber. *Pertama*, secara lingkungan eksternal hal yang mengancam program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ialah budaya patriarki yang masih kental tertanam didalam mindset-mindset para pekerja SKPD yang masih menganggap urusan gender ialah urusan perempuan saja sehingga acuh tak acuh ketika meresponnya. Ditambah ketidakpahaman tentang pengertian gender, isu-isu gender dan kebutuhan percepatannya dalam pembangunan sehingga untuk beberapa waktu pertama sulit memperkenalkan mereka dengan metode alur kerja analisis gender, terlebih membuat dokumen yang responsif gender itu tidaklah mudah.

Hal ini juga senada dengan hasil kontestasi pemilihan anggota legislatif Kabupaten Karawang karena para konstituen masih belum memberikan kepercayaan yang besar terhadap perempuan mampu menjadi seorang anggota dewan dan lebih memilih laki-laki menjadi wakilnya di DPRD. Meskipun dengan pengalamannya menjadi seorang Wakil Ketua DPRD Karawang ibu Hj. Sri Agustina menyampaikan bahwa besarnya partisipasi perempuan didalam legislatif itu tergantung kemauan perempuan untuk berjuang sampe akhir secara maksimal, namun peneliti berpendapat bahwa caleg perempuan ini bisa sampai pada kursi anggota DPRD ketika memang pemilihnya bisa menjatuhkan pilihannya pada perempuan sebagai wakilnya di DPRD. Sehingga lingkungan eksternal yang mempengaruhi berupa budaya patriarki ini haruslah secara masif di tangani dengan optimal.

Selain ancaman yang datang dari luar, kesempatan yang datang pun menjadi salah satu yang mempengaruhi keberhasilan program, kesempatan dari lingkungan eksternal datang dari Bupati Kabupaten Karawang yang cukup merespon pentingnya percepatan pengarusutamaan gender dengan mengeluarkan SK Pokja Gender dan memiliki target tertentu yakni anugerah parahita eka praya dalam pelaksanaan programnya.

Kedua dalam lingkungan internal, kapasitas organisasi merupakan hal yang memberikan pengaruh dalam maksimalnya sebuah program. Sejauh ini kapasitas organisasi yang dimiliki oleh bidang PUG dan KPPI cabang Karawang dinilai cukup baik karena setiap pelaksana programnya sudah mampu memenuhi tugasnya, meski di bidang PUG tidak memiliki pekerja lapangan namun sejauh ini cukup lancar.

3. Menentukan Arah

Dalam dimensi ketiga ini terdapat dua point yakni menentukan arah program dan target yang hendak dicapai. Dalam program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, arah yang akan dicapai bidang PUG sudahlah jelas yakni pemenuhan setiap SKPD yang ada di Kabupaten Karawang untuk memiliki metode alur kerja analisis Gender, agar setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan bisa responsif gender dan akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat responsif gender. Begitupun arah yang dimiliki KPPI ialah memaksimalkan

kuota 30% sehingga arah pembangunan di kabupaten karawang bisa sama-sama kita kawal agar berkeadilan gender.

Kemudian dari masing-masing arah tersebut sudah ditentukan target masing-masing yang hendak dicapainya, dan penulis menilai targetnya juga sudah sangat jelas meskipun cukup berat yakni DPPPA menargetkan dari 21 SKPD yang ada di Karawang ada 10 SKPD yang mampu membuat rencana program, kebijakan menggunakan metode alur kerja analisis gender, kemudian sesuai dengan arahan bupati DPPPA menargetkan Anugerah parahita eka praya untuk bisa didapatkan oleh Karawang. KPPI sendiri ditahun 2019 nanti menargetkan terpenuhinya kuota 30% anggota dewan perempuan dan Ketua DPRD perempuan.

4. Aksi

Dimensi aksi ini memiliki beberapa point didalamnya yaitu Strategi yang dijalankan, kebijakan apa yang telah dikeluarkan, struktur yang sudah dibentuk dan implementasi yang dilakukan.

Pertama, strategi yang dijalankan, berdasarkan data yang didapatkan penulis DPPPA sudah menjalankan starteginya dalam program peran serta dan kesetaraan gender baru sekedar memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap setiap SKPD agar memahami pentingnya percepatan kesetaraan gender kemudian dilanjutkan dengan memaksimalkan mitra-mitra strategis DPPA untuk dapat memaksimalkan lagi setiap potensi organisasi. Namun menurut peneliti tidak begitu jelas memaksimalkan mitra-mitra strategis ini dengan cara apa, karena sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penulis terhadap narasumber pun bahwa koordinasi DPPPA dengan para mitra hanya bersifat menerima rencana program dan rancangan anggaran lalu menerima laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, namun tidak ada pengawasan yang jelas, evaluasi yang rutin ataupun merawat jaringan disetiap organisasinya untuk keperluan program dan mennetukan target setiap tahunnya. Begitupun strategi yang dilakukan oleh KPPI, baru sekedar melakukan sosialisasi, pembekalan dan terhadap calon-calon anggota legislatif saja yang mungkin belum didapatkannya di partai politiknya.

Kedua, Kebijakan yang telah dikeluarkan, ada beberapa kebijakan yang membantu jalannya program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan meskipun bukan kebijakan yang langsung dikeluarkan oleh DPPPA, yakni kebijakan dikeluarkannya SK Kelompok Kerja Gender yang menjadikan setiap SKPD saling berkoordinasi dan bertanggungjawab untuk menjalankan percepatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Peneliti berpandangan kebijakan tersebut sangatlah penting untuk mengikat seluruh SKPD agar mampu melaksanakan tanggungjawabnya, apalagi itu datang dari Bupati Karawang langsung.

Ketiga, Implementasi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti implementasi dari program peran serta dan kesetaraan gender sudah baik bahkan melampaui target yang pernah ditargetkan sendiri oleh DPPPA, bahwa DPPPA menargetkan hanya sepuluh SKPD yang mampu menggunakan metode alur kerja analisis gender ternyata ada duapuluh SKPD yang mampu membuat itu setelah sosialisasi kedua dilakukan dengan target

pesertanya para Kepala SKPD, ini merupakan sebuah keberhasilan yang cukup diapresiasi, karena ternyata ketika program-program dari SKPD tersebut di masukan kedalam metode alur kerja analisis gender, program tersebut sudah responsif gender.

Kemudian implementasi dari program-program KPPI pun menurut penulis sudah cukup baik dan lengkap karena pembekalannya beragam bukan hanya untuk para calon anggota legislatif tapi juga untuk anggota DPRD perempuan masih diberikan pelatihan dan pembekalan.

5. Pembelajaran

Dalam dimensi terakhir dari teori strategi Geoff Mulan yakni Pembelajaran, peneliti berpandangan bahwa pembelajaran yang didapat oleh DPPPA khususnya bidang PUG dalam program peran serta dan kesetaraan gender sudah cukup baik karena dalam pelaksanaan programnya bidang PUG mampu merespon umpan balik yang datang dengan cukup cepat, ketika respon dari sosialisasi pembuatan setiap rencana program dengan metode kerja alur analisis gender kurang baik karena sasaran pesertanya hanya Kepala Sub Bagian yang tidak memiliki kekuatan yang kuat distuktural SKPD nya, disosialisasi kedua sasaran pesertanya diganti langsung dengan Kepala SKPD sebagai sasarannya dan akhirnya mendapatkan respon yang sangat baik di sosialisasi yang kedua.

Sedangkan KPPI dari data yang didapat peneliti masih menggantungkan keberhasilan organisasinya sebagian besar dikontestasi pemilihan calon legislatif nanti sehingga mereka akan melakukan evaluasi dan pembelajaran besar-besaran ketika sudah mendapatkan hasilnya. Padahal idealnya dengan melihat jumlah partisipasi yang kurang dari setiap kader partai politik perempuan pun itu sudah bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk melakukan pembelajaran dan evaluasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan dari program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah meningkatkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan agar partisipasi peran laki-laki maupun perempuan dapat setara dan sama-sama bisa menikmati hasil dari pembangunan. Sehingga Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Karawang dapat tinggi.
2. Lingkungan yang mempengaruhi dibagi menjadi dua. *Pertama*, lingkungan eksternal, lingkungan yang mengancam darinya ialah budaya patriarki dan ketidakpahaman tentang pemahaman gender yang utuh. Sedangkan lingkungan yang memberikan kesempatan yang bisa dimaksimalkan adalah respon yang cukup positif dari Bupati Kabupaten Karawang sebagai pimpinan tertinggi. *Kedua*, lingkungan internal,

kapasitas organisasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) cukup baik dan mendukung.

3. Arah dari program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ini adalah pemenuhan seluruh SKPD untuk menggunakan metode alur kerja analisis gender, sehingga akhirnya ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang yang responsif gender dan menjadikan legislatif sebagai pintu untuk merumuskan kebijakan dan pembangunan yang responsif gender.
4. Aksi yang dilakukan dari program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ialah *pertama*, melakukan strategi yang serupa yakni melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kebutuhannya masing-masing, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melakukan sosialisasi ke SKPD dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) melakukan sosialisasi ke setiap politisi perempuan karawang.
5. Pembelajaran yang didapatkan ialah umpan balik ketika pelaksanaan program tidak mendapatkan hasil yang cukup baik sehingga dirubah pola sosialisasinya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) langsung kepada Kepala SKPD dan belum adanya evaluasi yang serius yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan jumlah kehadiran politisi perempuan disetiap kegiatan.

Adapun Saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Memastikan semua program, kebijakan dan kegiatan disetiap SKPD sudah responsif gender. Karena keberhasilan program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan baru sekedar di dokumen perencanaannya saja yang sudah responsif gender namun yang paling vitalnya justru muncul di implementasi setiap perencanaan tersebut dan mengawal perwakilan perempuan di DPRD untuk membuat kebijakan yang pro gender.
2. Memberikan pemahaman terhadap SKPD yang ada di Karawang dan masyarakat luas tentang pentingnya isu gender dan budaya patriarki yang menghalanginya dan bergerak aktif menggandeng seluruh partner strategis untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk memberdayakan perempuan dalam semua bidang pembangunan
3. Memastikan Metode Alur Kerja Analisis Gender menjadi metode yang dimasukkan dalam setiap pembuatan dokumen perencanaan dan melakukan pelatihan rutin untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan yang pro gender agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memasang target-target pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Kesetaraan Gender yang terukur.
4. Adanya monitoring perkembangan terhadap focal point pengarusutamaan gender disetiap SKPD oleh DPPPA dan meningkatkan kembali peran dan fungsi Kelompok kerja gender yang sudah dibentuk
5. DPPPA menggandeng lembaga pihak ke 3 yakni Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat mengawasi implementasi dari setiap program yang dianggap pro gender di setiap SKPD dan monitoring rutin dari DPPPA terhadap para SKPD

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baramuli AA, 1998. *Pemikiran tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru*. Jakarta : Swadaya
- Geoff Mulgan, 2009. *The Art Of Public Strategi*. Oxford University Press
- Heywood Andrew. 2012. *Ideologi Politik Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- J. Salusu, 2000. *Pengambilan Keputusan Strategi k Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Rasindo
- Kristeva Santoso. 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Protelariat* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mansour fakih. 2008 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Muhammad Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Siscawati Mia. 2015. *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program*. Jakarta : Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2013. *Metode Peneltian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____, 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen

- Laporan Akhir Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/ BAPPENAS tahun 2007
- Kertas Kebijakan 1 tentang Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 Juni 2011
- Perempuan Penggerak Pembangunan Bupati Kabupaten Karawang pada Pelantikan Pengurus Asosiasi Analisa Kebijakan Indonesia
- Evaluasi Pengarusutamaan Gender disemban Sektor Pembangunan Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2006

Sumber Hukum

- Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Intruksi Pengarusutamaan Gender
- Keppmendagri 67/2011 pedoman umum pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

SK Bupati Karawang nomor 470.05 tentang POKJA PUG

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang tahun 2018

